



BULETIN PARLEMENTARIA

FEBRUARI 2017 • NOMOR 945/I/II/2017



NU ORGANISASI PENYEJUK BAGI SELURUH UMAT BERAGAMA

4 LARANG TUJUH NEGARA ISLAM
MASUK AS, PRESIDEN TRUMP
LANGGAR HAM

7 RS BAKTI TIMAH JADI
RUJUKAN ANGGOTA DPR RI



NU Organisasi Penyejuk Bagi Seluruh Umat Beragama



Ketua DPR RI, Setya Novanto

Ketua DPR RI, Setya Novanto mengatakan bahwa sejarah telah mencatatkan peran penting Nahdhatul Ulama (NU) sebagai institusi keagamaan yang terlibat dalam kemajuan dan peradaban bangsa dan negara. Bukan hanya dalam ranah sosial, politik dan ekonomi, tapi juga terutama dalam aspek budaya.

“ NU begitu identik dengan tradisi luhur masyarakat Indonesia. Sebab ia lahir dari rahim masyarakat, tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Sehingga NU sekian lama telah menjadi simbol kebangkitan masyarakat itu sendiri dari berbagai keterbelakangan. Dengan kata lain NU telah berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, membangun ekonomi umat, meneguhkan nilai-nilai sosial kemasyarakatan, hingga berperan dalam pendidikan politik di Indonesia,” papar Novanto dalam rangka memperingati hari lahirnya (Harlah) Organisasi Keagamaan

Islam Terbesar di Indonesia yang ke-91, Selasa (31/01).

Karena itu, lanjutnya, sebagai anak bangsa kita patut berbangga bahwa kita memiliki organisasi yang berbasis keagamaan yang justru telah turut terlibat bagi kemajuan bangsa dan negara. Tidak hanya bagi umat Islam, tapi juga bagi seluruh agama, ras, golongan. Bahkan bagi berbagai kepentingan yang berbeda-beda.

Atas dasar itulah, NU seringkali disebut sebagai paham yang berada di tengah, moderat, mampu beradaptasi dan berakulturasi dengan berbagai tradisi

serta paham keagamaan yang ada. Dengan kata lain, NU telah menunjukkan sebetulnya pemahaman yang menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi atas berbagai perbedaan paham yang berbeda-beda. NU selalu berdiri di tengah sebagai figur pengayom, penengah dan pemersatu bangsa.

“Menurut saya, NU adalah organisasi penyejuk bagi seluruh umat, bukan hanya umat muslim, tapi seluruh umat beragama di Indonesia, sejak dulu dimasa perjuangan kemerdekaan sampai saat ini. Karena itu, patutlah kiranya kita merenungkan kembali, menapak tilas jejak-jejak sejarah NU agar inspirasi perjalanannya tetap mewarnai perkembangan dan kemajuan bangsa kita saat ini,” jelasnya.

Tidak lupa, Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini mengucapkan selamat kepada Nahdlatul Ulama (NU), Organisasi Keagamaan Islam Terbesar di Indonesia yang hari ini memasuki hari lahirnya yang ke-91 tahun. ■

by:anti, foto: Anandita

Kekerasan Kepada Mahasiswa Tidak Boleh Terjadi Lagi

Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam, Fadli Zon menegaskan, kekerasan kepada mahasiswa, bahkan yang hingga menyebabkan kematian, tidak boleh terjadi lagi. Menurutnya, kasus kekerasan dari senior kepada juniornya sudah terlalu kerap terjadi.



Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam, Fadli Zon

“Sudah banyak kasus-kasus (kekerasan) serupa, seharusnya tidak boleh terjadi. Dulu, para senior kepada junior sering terjadi ospek, inisiasi atau semacam itu. Saya kira wajar, tapi takarannya sekarang berubah. Tidak boleh lagi dengan penyiksaan atau kekerasan fisik,” kata Fadli, di ruang kerjanya, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (25/01), saat menanggapi tewasnya tiga mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.

Menurut penilaian politisi F-Gerindra itu, sebenarnya sudah ada peraturan dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi terkait kegiatan kampus. Seharusnya tidak terjadi lagi, dan

sebelumnya sudah pernah terjadi.

“Dan mestinya tidak ada kejadian ini lagi. Dulu kan banyak kejadian seperti ini. Sekarang kadang-kadang masih ada kejadian serupa di sekolah-sekolah, khususnya yang ikatan dinas. Dulu sempat menonjol, seperti IPDN atau STIP,” ungkap Fadli.

Politisi asal dapil Jawa Barat itu pun meminta pengawasan dari penyelenggara kegiatan itu sendiri yang harus ditingkatkan. Terutama untuk kegiatan non formal di luar kampus.

Sebagaimana diketahui, latihan pendidikan dasar Mapala Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta menyebabkan tiga mahasiswa tewas. Ketiga korban tewas setelah mengikuti Diklatsar *The Grand Camping* (TGC) yang digelar Mapala (UII).

Tiga mahasiswa UII itu yakni Ilham Nurfadmi Listia Adi (20), Muhammad Fadli (19), dan Syaits Asyam (19), meninggal dunia setelah mengikuti kegiatan TGC di lereng selatan Gunung Lawu di Desa Gondosuli, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, pada 13-20 FEBRUARI 2017 lalu. ■



PENGAWAS UMUM
Pimpinan DPR RI

PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH
Achmad Djuned, S.H., M.Hum. (Plt. Sekjen DPR RI)

WAKIL KETUA PENGARAH
Dra. Damayanti, M.Si (DEPUTI PERSIDANGAN)

PIMPINAN PELAKSANA
Drs. Djaka Dwi Winarko, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI
Drs. Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)

WK. PIMPINAN REDAKSI
Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak),
Ahyar Tibi, S.H (Kasubag Media Analisis),
Nita Juwita, S.Sos (Kasubag MedSos dan Website)

REDAKTUR
Mastur Prantono, Suciati, S.Sos

SEKRETARIS REDAKSI
Bagus Mudjiharjanto

ANGGOTA REDAKSI
Agung Sulistiono, SH, Rahayu Setiowati, Muhammad Husen, Sofyan Efendi, Virgianne Meiske Patuli, Devi Iriandi, Hendra Sunandar, Surahmat Eko, Ria Nur Mega

REDAKTUR FOTO
Eka Hindra, Iwan Armanias

FOTOGRAFER
Rizka Arinindya, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Jayadi Maulana, Arief Rachman, R. Kresno P.D Moemporni, Azka Restu Fadilah

ADMINISTRASI FOTO
Hasri Mentari

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA
Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI
Gedung Nusantara II Lt. 3

Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta
Telp. (021) 5715348, 5715350 Fax. (021) 5715341,
e-mail: dpr.pemberitaan@gmail.com, www.dpr.go.id/berita

PENERBITAN & DISTRIBUSI

PIMPINAN PENERBITAN
Djastiawan Widjaya, S.Sos. M.AP (Kabag Penerbitan)

WK. PIMPINAN PENERBITAN
Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi),
Pesta Evaria Simbolon, S.E, M.Si (Kasubag Distribusi)

STAFF PRODUKSI
Eko Murdiyanto, Subadri, S.E, Barliansyah,
Fathurahman, Mujiono

SIRKULASI
Abdul Kahfi, S.Kom, Remon, Ifan,
Siti Rondiyah, Oji, Lamin, Arif

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421
Email : penerbitandpr@gmail.com

**HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN
HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN**



Larang Tujuh Negara Islam Masuk AS, Presiden Trump Langgar HAM

Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra, Fahri Hamzah

Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra, Fahri Hamzah menegaskan jika kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang melarang warga dari tujuh negara Islam masuk ke Amerika Serikat (AS) adalah sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Padahal, dalam konvensi internasional tentang kebebasan transportasi, telah dijelaskan bahwa tidak boleh ada negara yang menghambat warga negara mana pun untuk masuk ke negara lain selama seseorang itu memiliki dokumen yang lengkap.

“ Itu yang diadopsi dalam UU Imigrasi. Jadi, tidak boleh ada negara yang melarang satu warga masuk ke negara lain hanya karena terkait negara dan apalagi agamanya. Kebijakan tersebut sebagai bentuk kegelisahan Trump. Sehingga Amerika sebagai negara demokrasi yang dulu terlihat tenang, kini malah terguncang akibat kebijakan Trump,” tegas Fahri Hamzah di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (31/01).

Pelarangan tersebut lanjut Fahri, sebagai bentuk kegelisahan yang sudah tidak bisa

disembunyikan. “Itu artinya kegelisahan tidak bisa disembunyikan. Sekarang caranya adalah secara resmi Trump telah melakukan pelanggaran HAM. Kebijakan Trump baik secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada negara-negara lain, tak terkecuali Indonesia,” ujar politisi PKS itu.

Terlebih lagi kata Fahri, pelarangan itu diberlakukan bagi negara-negara Islam. Sedangkan Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk Islam terbesar di dunia. “Kita tahu, Amerika negara yang militernya paling kuat, ekonominya paling

kuat. Pasti dampaknya ke mana-mana baik langsung atau tidak langsung. Sayang, kebijakan itu bukan soal negaranya, tapi agamanya,” tambahnya.

Trump sebelumnya menandatangani perintah eksekutif untuk membatasi laju pengungsi dari sejumlah negara Islam ke AS. Trump mengaku kebijakan ini diambil demi mencegah masuknya kelompok militan ke AS.

Ketujuh Negara-negara itu adalah Iran, Irak, Suriah, Sudan, Libya, Yaman, dan Somalia. ■

em... (foto: whr)

Legislator Apresiasi Langkah MenPanRB Angkat PTT Nakes



Anggota Komisi IX DPR RI berdiskusi dengan Menteri Kesehatan RI

Anggota Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengapresiasi langkah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang telah menyetujui pengangkatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Tenaga Kesehatan (Nakes) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Mengingat, selama berbulan-bulan ini pihaknya telah memperjuangkan nasib PTT Nakes yang masih terkatung-katung.

“Alhamdulillah, perjuangan berbulan-bulan kita mendapatkan hasil, MenPanRB menyetujui pengangkatan 43.310 PTT menjadi PNS,” kata Nihayatul melalui rilis yang diterima Parlemen, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (31/01). Lebih lanjut, Politisi PKB itu menjelaskan jumlah 43.310 PTT Nakes tersebut terbagi menjadi dua kelompok, yakni 39.090 PTT yang berusia di atas 35 tahun dan 4.220 PTT yang berusia 35 tahun. Diketahui para PTT telah melakukan tes sejak tahun 2016 namun tidak ada tindak lanjut hingga saat ini akhirnya ada keputusan dari MenPanRB atas

Kita tidak pernah lelah untuk memperjuangkan nasib Nakes ini, karena merekalah yang berjuang untuk melayani masyarakat di kesehatan

perjuangan Komisi IX DPR RI.

"Kita tidak pernah lelah untuk memperjuangkan nasib Nakes ini, karena merekalah yang berjuang untuk melayani masyarakat di kesehatan. Saya tentu akan mengawal proses perekrutan ini, sehingga tidak ada permainan," jelasnya.

Nihayatul juga mengajak agar masyarakat membantu mengawal proses tersebut, jangan sampai ada pungutan liar dalam pengangkatan PTT Nakes itu. "Kalau ada yang meminta uang dalam proses ini, langsung lapor ke saya," tegasnya. ■

TAHUN BARU IMLEK MOMENTUM WUJUDKAN KESEJAHTERAAN EKONOMI

Dalam momentum tahun baru Imlek 2658, Wakil Ketua DPR RI bidang Korekku, Taufik Kurniawan mengajak masyarakat bisa mengambil hikmah, pelajaran yang terkandung dalam simbol Imlek tahun ini. Imlek tahun ini, adalah tahun Ayam Api dalam kepercayaan umat Tionghoa, di mana simbol ayam api mengajarkan tentang ketertiban, pengawasan dan perencanaan strategis.



Wakil Ketua DPR RI bidang Korekku, Taufik Kurniawan

Watua Koordinator Ekonomi dan Keuangan ini memprediksi, dalam Tahun Ayam Api 2017

diperkirakan iklim investasi menunjukkan hal positif. Suatu hal yang juga penting dalam perubahan tersebut adalah perubahan pada kehidupan yang lebih baik. Ekonomi bertumbuh, masyarakat lebih memperoleh kesejahteraan dan jaminan hari esok yang lebih baik.

"Tentu saja, kita semua berharap apa yang digalakkan oleh Pemerintah dan negara dengan berbagai program dan kebijakan yang merakyat akan terus terjaga dan terjalin dengan baik. Program-program ekonomi kerakyatan akan memberi kesempatan yang besar dan luas bagi terwujudnya kesejahteraan," papar Taufik, baru-baru ini.

Dia menjelaskan, ada banyak hikmah yang bisa dipetik dari perayaan dan momentum tahun baru tersebut. Setidaknya, sebagai sesama anak bangsa, telah menapaki perubahan demi perubahan. Perubahan yang membawa masyarakat pada perbaikan setiap waktu.

Tahun Baru Imlek hendaknya bukan sekedar keceriaan warga Tionghoa, namun juga saudara-saudara sebangsa dan setanah air. "Selain itu, sebagaimana lazimnya pergantian tahun, selalu ada evaluasi terhadap apa yang telah dicapai dan apa yang kita harus tingkatkan di masa yang akan datang," ungkap Taufik.

Momentum Imlek tentu saja menginspirasi rakyat untuk tetap optimis menatap masa depan. Apa yang dicapai tahun sebelumnya adalah tonggak penting bagi pencapaian lebih baik di tahun ini.

"Selamat Merayakan Tahun Baru Imlek 2568, Gong Xi Fa Chai. Semoga keselamatan dan kesejahteraan senantiasa menyertai kita," pungkask Taufik. ■

©(K) foto: kementerian

RS Bakti Timah Jadi Rujukan Anggota DPR RI



Wakil Ketua BURT, Agung Budi Santoso memberikan cenderamata kepada Direksi RS Bakti Timah

Sejumlah Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI meninjau Rumah Sakit Bakti Timah Kota Pangkalpinang, guna melakukan pengawasan pelaksanaan program jaminan kesehatan bagi Anggota DPR RI dan keluarganya.

Anggota DPR RI menilai RS Bakti Timah cukup memenuhi syarat untuk dijadikan salah satu rumah sakit rujukan bagi Anggota DPR RI dan keluarganya untuk memeriksakan kesehatan.

Wakil Ketua BURT Agung Budi Santoso mengatakan bahwa fasilitas rumah sakit ini sudah cukup baik dan memadai untuk menunjang program asuransi Jamkestama VVIP.

"Rumah sakit ini sudah memenuhi standar untuk pelayanan asuransi Jamkestama," katanya, usai BURT melakukan dialog dan meninjau

fasilitas RS. Bakti Timah, di Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Selasa (31/01).

Patut diketahui, BURT memberikan kepercayaan pelaksanaan program jaminan pelayanan kesehatan bagi Anggota DPR RI dan keluarganya kepada PT. Jasindo.

Kemudian, hubungan dan kerjasama PT. Jasindo dengan rumah sakit ini juga sudah baik. SOP nya sudah ada, telah dilakukan sosialisasi.

Dengan ada kerja sama PT. Jasindo dengan RS Bakti Timah akan membuat pelayanan kepada Anggota DPR RI dan keluarganya menjadi baik.

"Saya pikir tidak ada kendala Jamkestama di wilayah provinsi kepulauan Bangka Belitung ini," katanya.

Agung Budi Santoso melihat juga PT. Jasindo sudah berbenah untuk memperbaiki kinerja dibanding tahun sebelumnya. ■

©(as/mt) foto: as/mt

Tim PKAKN Badan Keahlian DPR RI Kunjungi Banyuwangi

Tim Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Banyuwangi, Rabu (01/02). Tim yang dipimpin Kepala PKAKN Helmizar tersebut datang ke Banyuwangi untuk melihat secara langsung sistem keuangan daerah Banyuwangi.

“Pengelolaan anggaran Banyuwangi sudah cukup bagus dan transparan, mulai dari perencanaan, penganggaran, tata kelola hingga evaluasi keuangan telah terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi yang bisa diakses secara luas,” kata Helmizar saat diterima Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah, Djajat Sudrajat, di Lounge Pelayanan Publik di Banyuwangi.

Bahkan, lanjut Helmizar, dengan sistem keuangan yang telah terintegrasi tersebut, Banyuwangi berhasil empat kali berturut-turut memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Ini yang membawa kami datang ke Banyuwangi. Kami ingin mengumpulkan data dan informasi terkait temuan-temuan BPK pada pengelolaan anggaran di sini. Akan kami buat kajiannya, adakah

pengaruhnya pada investasi di Banyuwangi? Hasilnya akan kami serahkan kepada alat kelengkapan DPR RI untuk menentukan langkah solutifnya," terang Helmizar.

Setiba di Banyuwangi, rombongan yang terdiri dari 9 orang tersebut langsung melihat aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), *e-Village Budgetting (e-VB)* dan *e-Monitoring System (e-MS)* yang ada Lounge Pelayanan Publik. Mereka mencoba langsung aplikasi *online* tersebut lewat layar monitor yang tersedia di ruang tunggu yang didesain elegan dan nyaman itu. Merekapun tampak kagum dan mengapresiasi aplikasinya.

"Pengelolaan keuangan Banyuwangi sudah akuntabel sekali. Baru kali ini saya melihat daerah yang sangat transparan. EVB nya juga oke, di Jakarta saja belum berani buat, justru Banyuwangi sudah mendahului. Keren," kata Helmizar.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah, Djajat Sudrajat,

mengatakan dalam mengelola keuangan, Banyuwangi menggunakan sistem *online* yang terintegrasi langsung dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah. Sejak tahun 2014, Banyuwangi telah menerapkan pengelolaan keuangan dengan sistem akrual.

"Dengan sistem ini Banyuwangi menjadi kabupaten pertama di Jawa Timur dan tiga se-Indonesia yang telah menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual," kata Djajat saat menerima rombongan tersebut.

Selain itu, Banyuwangi juga telah menerapkan e-audit terintegrasi di mana auditor tidak memerlukan surat izin untuk masuk ke seluruh dinas hingga desa-desa. E-audit juga bisa langsung mengecek tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Semua langsung jalan lewat *online* secara *real time*, termasuk mengaudit hingga ke desa-desa," ujarnya.

Banyuwangi juga menerapkan *e-village budgeting* dan *e-village monitoring*, sistem penganggaran desa yang terintegrasi dalam jaringan (*daring*) untuk meningkatkan akuntabilitas anggaran desa. Sistem ini memangkas mata rantai penyusunan dan pengawasan anggaran secara manual di level desa.

"Di Banyuwangi ada 189 desa, jadi tidak efektif jika kita kontrol secara manual. Namun, melalui sistem ini, kontrol atas pemanfaatan dana desa bisa dilakukan setiap saat tanpa harus datang ke desa-desa. Kita bisa tahu progress pekerjaan hingga ke pelosok desa lengkap dengan foto dan titik lokasinya melalui *Google Maps*. Sehingga tidak bisa ada proyek ganda atau fiktif. Sistem ini sekaligus untuk memberi perlindungan bagi perangkat desa agar selalu sesuai aturan," tutup Djajat (BKD). ■

foto: cdk, im peakan bsk/ri

Tim PKAKN BK DPR RI menggelar pertemuan dengan Plt Sekda Banyuwangi

Pergantian Pejabat, Atasi Kegiatan yang Kian Meningkat

Plt. Sekjen DPR RI Achmad Djuned melantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Administrator dan Pengawas yang ada dilingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Pelantikan dan pergantian tersebut dilakukan untuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh pejabat sebelumnya karena telah memasuki masa pensiun, dan karena adanya proses mutasi.



Plt. Sekjen DPR RI, Achmad Djuned melantik 13 pejabat Setjen DPR RI

“ Ada beberapa pejabat yang pensiun dan harus segera diisi posisinya, agar jangan sampai terjadi kevakuman pada unit itu. Pergantian pejabat-pejabat yang lain perlu dilakukan karena adanya dinamisasi kegiatan-kegiatan yang semakin meningkat dan tinggi, oleh karenanya perlu dilakukan suatu langkah penyegaran,” ucap Achmad Djuned di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (01/02).

Ia menjelaskan bahwa untuk pelantikan kali ini ada 13 orang pejabat yang dilantik, diantaranya adalah satu orang untuk jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yakni Kepala Biro Persidangan II yang membawahi Bagian Sekretariat BURT, Sekretariat Baleg, Sekretariat Banggar, maupun Sekretariat MKD, kemudian 3 orang dilantik untuk jabatan Administrasi, yaitu pada jabatan Kepala Bagian Angkutan, Kepala Bagian Mahkamah Kehormatan Dewan, dan

Kepala Bagian Layanan Pengadaan.

“Proses seleksi jabatan tinggi Pratama dilakukan sesuai dengan yang diamanatkan ASN, yakni melalui Panitia Seleksi (Pansel) yang mulai bekerja sejak bulan Desember. Siapapun yang memenuhi syarat dipersilahkan untuk mendaftar,” ujarnya.

Djuned berharap, kepada pejabat-pejabat yang telah dilantik untuk segera bisa beradaptasi dengan tugas-tugasnya yang baru, baik yang promosi maupun yang mutasi.

“Mereka sebagai agen perubahan yang harus bisa melakukan berbagai inovasi, dimana dengan inovasi tersebut, mereka akan bisa merumuskan perubahan untuk peningkatan kinerja bagi lingkungannya dan juga bagi Sekretariat Jenderal DPR RI,” tandasnya.

Adapun nama beberapa pejabat yang dilantik itu adalah : Cholida Indryana (Karo Persidangan II), Dwi Marijanto (Kabag Kendaraan), Achmad Prasetyo (Kabag Layanan Pengadaan), Novianti (Kabag Sekretariat MKD), Mc. Zaqki Zachariaz Thamrin (Kasubag TU Bagian Set. Komisi III).

Insan Abdirrohman (Kasubag TU Bagian Set. Wakil Ketua Bidang Polkam), Anung Dipto Hapsoro (Kasubag Pemeliharaan Kendaraan Dinas Bagian Kendaraan), Etmida Ardem (Kasubag Acara Alat Kelengkapan Dewan Bagian Acara), Nita Juwita (Kasubag Media Sosial dan Website Bagian Media Cetak dan Media Sosial).

Adang Firmansyah (Kasubag Pelayanan Wisma Bagian Pengelolaan Wisma DPR), Saeful Anwar (Kasubag Teknik Televisi Bagian Televisi dan Radio Parlemen), Parit (Kasubag Evaluasi dan Pelaporan Bagian TU Badan Keahlian), dan Aan Yulianingsih (Kasubag Penyiapan Administrasi Bagian Administrasi Kegiatan Luar Negeri Anggota). ■

Pemerintah Diminta Cabut Kepmen 260 Tahun 2015

Anggota Tim Pengawas Tenaga Kerja Indonesia (TKI) DPR RI Rieke Diah Pitaloka minta pemerintah mencabut Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 260/2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan TKI Pada Pengguna Perseorangan di Negara-Negara Kawasan Timur Tengah.



Anggota Tim Pengawas TKI DPR RI, Rieke Diah Pitaloka

Hal tersebut ditegaskannya dalam Rapat Koordinasi Timwas TKI dengan Ditjen Kemenakertrans, Ditjen Imigrasi Kemenkumham, BNP2TKI, Pemprov Jawa Barat, NTT, NTB, Jawa Timur, Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI), Asosiasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (Aspataki) dan sejumlah ormas terkait di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (01/02).

"Kepmennya kalau bisa dicabut, diperbaiki, karena ini tidak sesuai dengan pasal 27 UU Nomor 39 Tahun 2004," ujar Rieke.

Menurutnya, semenjak diberlakukannya Kepmen yang berisikan penghentian dan pelarangan penempatan TKI sektor domestik atau pengguna perseorangan di 19 negara kawasan Timur Tengah, justru memperbanyak pengiriman TKI non prosedural.

"Kami berharap ada langkah konkret dari

pemerintah, sesuai dengan pasal 27 jangan menjadi ambigu karena Kepmen ini ambigu, maka menambah angka non-prosedural," pinta Rieke.

Lebih lanjut ia menjelaskan, saat ini pengiriman TKI sektor domestik telah dihentikan sejak Mei 2015, namun pengiriman TKI di sektor domestik tetap berjalan dengan dalih bekerja sebagai *cleaning service*. Artinya, ada indikasi pelanggaran terhadap hukum karena Kepmen tidak boleh bertentangan dengan UU.

Politisi PDI-Perjuangan itu juga mendesak pemerintah untuk segera merevisi UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (PPTKILN). Disinyalir, adanya indikasi perdagangan manusia berkedok TKI oleh perusahaan *Team Time Co* (TTCO) yang berpusat di Jeddah.

Ia meminta agar revisi UU PPTKILN diharmonisasi bersama UU Nomor 21 Tahun

" Kepmennya
kalau bisa dicabut,
diperbaiki, karena
ini tidak sesuai
dengan pasal 27
UU Nomor 39
Tahun 2004 "

2007 tentang pemberantasan tindak pidana orang. Nantinya, revisi tersebut diharapkan dapat menjerat korporasi maupun oknum yang terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang.

"Bahwa tidak cukup hanya dicabut ijinnya atau sanksi administratif, tetapi juga sanksi pidana penjara, termasuk tidak boleh lagi mendirikan perusahaan," ucap Rieke.

"Sanksi pun juga harus dikenakan kepada pejabat negara yang terlibat tanpa pandang bulu. Jadi efek jera itu bukan hanya pihak swasta tetapi juga pejabat negara yg terlibat dalam mekanisme ini," tandasnya. ■

(am) Foto: Rieke

DPR RI Dorong BPBD Bima Buat Program Jangka Panjang

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Malik Haramain mendorong Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten dan Kota Bima untuk segera membuat program jangka panjang terkait penanggulangan banjir bandang yang menimpa masyarakat Bima pada akhir desember lalu.

“Penanggulangan banjir bandang ini tidak hanya memerlukan penanganan singkat atau cepat, tetapi jangka panjang. Program-program yang diusulkan BPBD pasti kita akan dorong,” kata Abdul Malik dalam kunjungan spesifik komisi VIII ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis, (26/01).

Lebih lanjut, kata politisi F-PKB itu, banjir di Bima terjadi hampir setiap tahun, namun kali ini yang terparah karena curah hujan cukup tinggi selama dua hari. Menurutnya, Kabupaten Bima sudah tidak mampu menampung debit air dikarenakan kondisi hutan yang gundul menjadi salah satu penyebab banjir.

“Saya kira Pemprov dan pemerintah pusat harus memikirkan bagaimana hutan itu harus terpelihara dengan baik. Karena ini sudah berulang-ulang, maka harus ada kebijakan khusus dari Pemprov menyangkut ini,” tegasnya.

Menurutnya, untuk mengantisipasi agar

tidak terjadi lagi banjir di Bima maka diperlukan pembangunan waduk dan normalisasi sungai serta revitalisasi pembuangan air atau *drainase*.

Ia juga mendorong agar Pemda Bima bekerja lebih keras untuk menertibkan dan mendisiplinkan warganya dari hal yang paling kecil seperti tidak membuang sampah disungai.

“Saya kira harus disosialisasikan dan jika perlu dipaksakan kepada masyarakat. Sebetulnya kan penyebab banjir dimana-mana sama, hampir semua problem utamanya itu karena ketidaksiplinan manusia. Tetapi itu bisa kita minimalisir kalau ada aturan main dan penegakkan hukum yang membuat kita dipaksa untuk disiplin,” tandas Abdul Malik.

Sementara itu, Walikota Bima Qurais Habidin mengatakan untuk melakukan upaya pemulihan atau rehabilitasi konstruksi pasca bencana berkisar Rp1,2 triliun. “Dalam

kesempatan ini, kami mohon kiranya bisa membantu mempercepat pemulihan Bima,” ungkap Qurais.

Seperti diketahui, banjir bandang terjadi dua kali pada tanggal 21 dan 23 desember 2016 menimpa Kota dan Kabupaten Bima. Akibat banjir bandang tersebut, 86 persen wilayah Kabupaten Bima terdampak banjir, 8.491 jiwa mengungsi, 9.200 luka-luka, 138 rumah hanyut, 397 rumah rusak berat, 363 rumah rusak sedang, 421 rusak ringan, dan puluhan sekolah rusak. Tak hanya itu, jembatan dan fasilitas infrastruktur lainnya juga rusak.

Turut hadir Hadir Anggota VIII DPR RI Iket Tridjajati Sumariyanto (F-PDIP), Rachmat Hidayat (F-PDIP), Wenny Haryanto (F-PG), Muhammad Lutfi (F-PG), Rahayu Sarawasti Djojohadikusumo (F-GER), Linda Megawati (F-PD), Maman Imanul Haq (F-PKB), Muhammad Yudi Kotouky (F-PPS), Muslich (F-PPP), dan Arief Suditomo (F-Hanura). ■



Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Malik Haramain

Terkait Kekerasan kepada Mahasiswa, Penyelenggara Pendidikan Harus Diberi Sanksi

Anggota Komisi X DPR RI Dony Ahmad Munir menegaskan, perlu adanya sanksi kepada penyelenggara pendidikan, jika masih terjadinya kekerasan kepada mahasiswanya. Apalagi kekerasan yang hingga menyebabkan jatuhnya korban tewas.

Demikian diungkapkannya ketika menanggapi tewasnya tiga mahasiswa setelah mengikuti Diklatsar *The Great Camping* (TGC) yang digelar Mapala Universitas Islam Indonesia (UII) di Gunung Lawu, Jawa Tengah pada 13-20 Januari 2017 lalu.

"Harus ada *punishment* terhadap penyelenggara pendidikan, yang tidak melaksanakan peraturan dalam penyelenggaraan kegiatan, sehingga ada efek jera. Harapan kita, akan ada sanksi seperti menurunkan akreditasi," tegas Dony, di sela-sela raker dengan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (25/01).

Politisi F-PPP itu juga meminta perlu adanya sistem yang membuat kekerasan tidak terjadi lagi. Kemenristekdikti, maupun penyelenggara pendidikan harus betul-betul memberikan perhatian pada kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan anak didiknya. Sistem itu harus menjamin keselamatan dan keamanan mahasiswa, sehingga tak ada lagi peristiwa yang

menyebabkan kematian.

"Kemenristekdikti harus memonitor itu. Menjamin bahwa aturan dijalankan dengan baik. Penyelenggaranya pun harus menjalankannya dengan baik. Dan harus betul-betul koordinasi dalam menjalankan pengawasan. Misalnya sebelum acara, ada pengarahan dulu dari rektorat untuk mengedepankan keselamatan," jelas Dony.

Kasus-kasus kekerasan kepada anak didik, seperti tewasnya taruna Sekolah Tinggi Pelayaran (STIP) terjadi beberapa waktu lalu, seharusnya menjadi contoh bagi penyelenggara pendidikan agar lebih hati-hati.

"Berarti ada yang salah dari sisi pengawasan. Kemudian pelaksanaannya pun mungkin ada keteledoran. Senioritas juga harus dihilangkan. Karena kejadian kekerasan bisa berawal dari situ," pesan politisi asal dapil Jawa Barat itu, sembari meminta pihak berwajib menyelidiki kasus ini hingga tuntas.

Sebagaimana diketahui, latihan pendidikan dasar Mapala Universitas Islam



Anggota Komisi X DPR RI, Dony Ahmad Munir

Indonesia (UII) Yogyakarta menyebabkan tiga mahasiswa tewas. Ketiga korban tewas setelah mengikuti Diklatsar *The Grand Camping* (TGC) yang digelar Mapala (UII).

Tiga mahasiswa UII itu yakni Ilham Nurfadmi Listia Adi (20), Muhammad Fadli (19), dan Syaits Asyam (19), meninggal dunia setelah mengikuti kegiatan TGC di lereng selatan Gunung Lawu di Desa Gondosuli, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, pada 13-20 Januari 2017 lalu. ■

es/foto.keseno/wk

Pemerintah Diminta Ambil Sikap Terkait Kebijakan Diskriminatif Trump

Ketua Komisi I Abdul Kharis Almasyhari menilai kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang melarang masuknya tujuh warga negara muslim yakni Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Syria atau Yaman ke Amerika Serikat sangatlah diskriminatif. Menurutnya Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, harus mengambil sikap terkait kebijakan Donald Trump tersebut.

“ Saya berharap Pemerintah Indonesia dapat bersikap, sebagaimana Turki dan negara Islam lainnya. Kebijakan Trump itu jelas-jelas diskriminatif dan tidak boleh dibiarkan,” ujar Abdul Kharis di Jakarta, Senin, (31/01).

Ia mengakui bahwa kebijakan Trump itu membuat risau negara-negara yang berpenduduk muslim seperti Indonesia. “Meski tidak termasuk ketujuh negara tersebut, kebijakan ini membuat risau sejumlah negara yang mayoritas berpenduduk muslim, khususnya



Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari

Indonesia baik yang sudah menetap maupun yang akan berkunjung ke AS," ujarnya.

Politisi PKS ini menilai, kebijakan Trump yang melarang tujuh negara muslim datang ke Amerika terkesan membuat *stereotype* bahwa tiap warga yang berasal dari tujuh negara tersebut sudah pasti teroris. Sehingga ini bisa membuat semangat anti Islam di Amerika Serikat.

"Dengan menyebut pelarangan negara Islam datang ke Amerika Serikat, maka kebijakan tersebut terkesan membuat *labeling* bahwa seseorang yang berasal dari tujuh negara tersebut sudah pasti teroris dan dapat mengganggu keamanan AS. Hal ini bisa saja membangkitkan anti-Islam di negara tersebut," ungkap legislator dapil Jawa Tengah V tersebut.

Ia juga memaparkan bahwa kebijakan pelarangan itu tidak hanya berdampak pada tujuh negara muslim yang dilarang, namun juga akan berdampak pada seluruh negara muslim di dunia, salah satunya Indonesia. "Dan tidak hanya tujuh negara itu, tapi bisa saja *ber-impact* terhadap keberadaan warga negara lainnya yang mayoritas muslim dan sudah menetap di Amerika, termasuk indonesia," tutup Kharis. ■

(reality) Foto: Juke/oci

Baleg Setujui RUU PKS

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui draf Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) untuk dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan menjadi usul inisiatif DPR RI.

Wakil Ketua Baleg Totok Daryanto menjelaskan RUU PKS akan memberikan perlindungan pada semua lapisan masyarakat dari tindak kekerasan seksual, termasuk untuk anak-anak. "Dengan adanya RUU ini maka perempuan, anak-anak juga laki-laki akan terlindungi dari kekerasan seksual," ungkap Totok di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (31/01).

Lebih lanjut, politisi dari F-PAN itu menjelaskan RUU ini dimaknai sebagai dasar untuk membangun norma atau etika baru bagi seluruh masyarakat agar tidak mudah melakukan kekerasan maupun pelecehan seksual.

"Ataupun perilaku-perilaku yang merendahkan secara seksual, misalnya

Sementara Anggota Baleg sekaligus pengusul RUU PKS Nihayatul Wafiroh mengatakan, prinsipnya muatan RUU ini lebih memberikan perlindungan kepada korban dan juga mewajibkan pemerintah untuk melakukan pencegahan tindak kekerasan seksual.

"Beberapa poin penting yang tidak ada dalam UU lainnya seperti hak korban dan hak keluarga korban. Itu yang selama ini tidak tercover baik dalam UU KUHP dan UU lainnya," terang politisi PKB itu.

Ia melanjutkan, RUU PKS akan mengakomodir hak ganti rugi dan pemulihan untuk korban, sedangkan untuk pelaku kekerasan seksual diutamakan untuk direhabilitasi. Menurutnya, hal itu penting dilakukan karena kekerasan seksual bisa saja disebabkan karena

kelainan jiwa sehingga pelaku mengulang aktivitas yang sama.

"Banyak sekali pelaku yang ketika dimasukkan ke penjara, bukan sembuh malah semakin menjadi karena sebenarnya



Anggota Baleg DPR RI menandatangani draf RUU PKS

atasan kepada stafnya atau sesama teman. Kadang-kadang perempuan menjadi korban, itu semua diatur dalam RUU ini," jelasnya.

orang melakukan kekerasan seksual itu bermula dari pikiran, jadi pikiran itu yang harus diubah," tandas Nihayatul. ■

(reality) foto: oghr

Penerapan *Voucher* Pangan Beda Konteks Dengan Esensi Keberadaan Bulog

Salah satu dukungan prioritas pencapaian dukungan kedaulatan pangan melalui kebijakan penyediaan subsidi pangan dengan pelaksanaan program beras sejahtera, yang mulai tahun 2017 akan dilakukan pengalihan sebagian subsidi rastra menjadi bantuan pangan dengan mekanisme non tunai atau *voucher* pangan di 44 kota besar, dengan target sasaran sebanyak 1,4 juta Keluarga Sasaran Penerima Manfaat (KSPM) melalui Kementerian Sosial dan akan disinergikan dengan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai salah satu pelaksanaan fungsi perlindungan sosial.



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Herman Khaeron

Setelah mendengar penjelasan teknis dari mekanisme pengalihan sebagian subsidi pangan dan penyaluran bantuan pangan melalui mekanisme non tunai atau *voucher* pangan yang disampaikan oleh Dirjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kemensos, staf Kepresidenan RI, dan Dirut Perum Bulog saat rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR RI, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron mengatakan, keberadaan Bulog adalah untuk menstabilkan harga. Sebab stabilisasi harga menjadi instrumen utama, baik stabilitas ditingkat petani maupun ditingkat pasar. "Kalau dikaitkan antara *voucher* pangan

dengan esensi keberadaan Bulog saat ini, maka beda konteks dan tidak *nyambung*. Karena stabilitas harga itu dipenuhi oleh keterjangkauan, ketersediaan dan referenstrasi subsidi yang diberikan kepada masyarakat," ucap Herman di Gedung Parlemen, Senin (30/01).

Menurutnya, Bulog sebagai instrumen negara yang diberikan tugas oleh pemerintah untuk menyimpan beras dan menyalurkannya kepada orang yang berhak menerimanya, semestinya tidak dirubah menjadi satu bentuk kartu *voucher* pangan yang menjadi bagian dari penyaluran raskin, sebab memiliki konteks yang berbeda.

"Dengan bantuan pangan ini, malah menambah rumit dipasar. Yang selama ini Bulog dapat mengendalikan dengan raskin, kemudian dikurangi tingkat raskin atau rastranya, tetapi pada sisi lain demand semakin meningkat, karena ada bantuan atau *voucher* pangan dalam bentuk kartu tersebut," ujarnya.

Herman menyatakan, kalau anggaran untuk bantuan pangan itu juga mengambil dari bagian yang telah disetujui didalam raskin, maka hal itu menyalahi undang-undang APBN. Bulog ditetapkan di DPR RI sebagai mitra kerja Komisi IV DPR RI, sehingga seluruh fungsi dan tugas DPR RI melekat dengan Bulog. Baik mengenai pengawasan, penganggaran, maupun legislasi. Sehingga setiap Komisi IV DPR RI membahas terhadap berbagai aspek, maka Bulog selalu dilibatkan.

"Memang ada beberapa persoalan, seperti masalah kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, dan harga, yang akhirnya selalu dijadikan alasan lahirnya bantuan pangan itu," pungkasnya. ■

Foto: Juy/Pr

ABK Menjadi Korban Perbudakan, DPR RI Minta Pemerintah Segera Bertindak

Anak buah kapal (ABK) asal Indonesia yang bekerja di kapal ikan Taiwan dilaporkan menjadi korban perbudakan dan perdagangan manusia. Menanggapi hal itu, Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi meminta pemerintah segera bertindak menghubungi perwakilan Indonesia di Taiwan untuk membantu penyelidikan dan menyelamatkan masalah perbudakan yang kerap menimpa ABK.



Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi

“Kita wajib memberi perlindungan kepada ABK. Maka dari itu, Pemerintah harus segera mengirim dan menghubungi perwakilan Indonesia di Taiwan untuk membantu penyelidikan,” kata Dede di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (26/01).

Lebih lanjut politisi Partai Demokrat itu mengatakan, di seluruh dunia berlaku Maritime Labour Convention (MLC) yaitu aturan guna memberi perlindungan kepada para ABK. Indonesia pun sudah meratifikasi konvensi itu. Namun dirinya tidak tahu apakah Taiwan sudah meratifikasi atau belum, sebab Indonesia tidak ada hubungan diplomatik dengan Taiwan.

“Masalahnya kita tidak ada hubungan diplomatik dengan Taiwan, dan kita tidak tahu apakah Taiwan sudah meratifikasi MLC atau belum. Namun, paling tidak ini sudah menjadi pelajaran bagi kita untuk tidak membiarkan ABK kita bekerja pada kapal yang tidak memiliki aturan,” tegasnya.

Untuk itu, Dede meminta pemerintah berbicara kepada Taiwan untuk memberi sanksi kepada perusahaannya yang telah melakukan perdagangan manusia dan perbudakan kepada ABK Indonesia.

“Ini jangan terjadi lagi, kita harus membuat aturan main, ABK diberikan daftar negara yang tidak memiliki MLC agar berhati-hati,” tegas politisi asal dapil Jawa Barat itu.

Sementara, terkait terjadinya diskriminasi terhadap ABK yang tidak memiliki kemampuan, Dede meminta pemerintah menyelidiki perusahaan yang diduga merekrut, menyalurkan, dan mempekerjakan ABK secara ilegal. Ia juga menyayangkan sikap pemerintah yang mudah sekali memberikan izin bagi ABK yang ingin bekerja di laut.

“Ini yang harus dikoreksi kenapa mudah diberi izin. Harusnya diberi pelatihan dulu, sertifikasi harus jelas, ini harus dipikirkan ke depan, tidak boleh merekrut orang dengan mudah, lalu di berangkatkan,” katanya.

Mudahnya pemberian izin itu yang dinilai Dede membuat ABK mengalami diskriminasi, sebab mereka yang berangkat rata-rata hanya lulusan SMA yang diiming-imingi dengan gaji besar.

“Saya sering mendapat laporan dari ABK mereka hanya lulusan SMA, ditawari kerja lalu ditempatkan di kapal tanpa mengetahui tentang bagaimana ini dan itu, sehingga ada diskriminasi seolah-olah orang kita tidak tahu apa-apa. Ini harus dikoreksi,” tegasnya. ■

(rmi/foto:wan amanah/afw)

Nasir Djamil Prihatin Hakim Konstitusi Terkena OTT KPK

Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil prihatin atas tertangkapnya Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Patrialis Akbar dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).



Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil

“Saya mengucapkan Innalillahi wainnailahi rojuin. Ini musibah bagi bangsa ini jika Patrialis Akbar benar-benar menerima suap terkait dengan tugasnya sebagai hakim MK,” ujar Nasir sesaat sebelum Rapat Panja KUHP Komisi III DPR RI di Senayan Jakarta, Kamis (26/01).

Posisi hakim konstitusi, lanjut Nasir, merupakan posisi yang sangat strategis dan sangat mulia. Apalagi putusan hakim konstitusi itu final dan mengikat. Karenanya kalau memang benar berita ada hakim konstitusi yang tertangkap tangan oleh KPK itu sangat menyedihkan.

“Saya kenal beliau, rasanya tidak percaya kalau beliau melakukan itu. Pasalnya beliau tergolong religius dan punya sikap. Kenapa beliau masuk dalam pusaran itu, itu yang belum saya tahu. Apakah atas inisiatif sendiri akibat godaan yang terus menerus. Atau beliau bagian dari operasi intelijen yang menargetkan

beliau,” papar politisi dari Fraksi PKS ini.

Ditambahkan Nasir, kalau memang ada operasi intelijen yang menargetkan hal itu artinya memang ada upaya membunuh karakter Patrialis. Sehingga ada yang mengarahkannya untuk menerima suap.

“Tentu saja saya tidak menuduh KPK untuk hal itu. Tapi bisa saja ada pihak lain. Kalau pun itu benar. Kita tunggu saja pengakuan dari yang bersangkutan. Apa itu berkaitan dengan keputusan MK soal Pasal 3 dan 4 UU Tipikor yang menyebutkan kerugian Negara menjadi delik materi, bukan delik formil. Dimana untuk menjadikan seseorang tersangka harus ada pembuktian dulu dengan adanya kerugian Negara,” jelas Politisi dari Dapil NAD.

Terkait hal tersebut, Nasir menilai sudah seharusnya DPR RI dan Pemerintah mengevaluasi UU MK. Dimana sudah seharusnya hakim-hakim MK menjalani *fit and proper test* secara terbuka, mulai dari Presiden ke MA. Selama ini baru DPR RI lah yang melakukan itu. melibatkan partisipasi publik kemudian mengumumkan kepada khalayak untuk kemudian dilakukan *fit and propertest* terbuka.

Konon, keterpilihan Patrialis Akbar menjadi hakim MK juga sempat menjadi pro dan kontra. Karena ada prosedur yang dilanggar. Oleh karena itu ke depan Nasir menilai, agar tidak ada tudingan macam-macam semua itu harus dibuka.

Sementara itu terkait pendapat yang mengatakan masih kurangnya kesejahteraan bagi hakim konstitusi, Nasir Djamil tidak sependapat. Pasalnya, kesejahteraan hakim konstitusi saat ini sudah sangat memadai. Sehingga tidak ada alasan mereka melakukan tipikor. ■

(rmi/foto: afw/h)

RUU Wawasan Nusantara Perkuat Keberagaman Ciptakan Persatuan

Rancangan Undang-undang Wawasan Nusantara (RUU Wasnus) disusun salah satu tujuannya untuk memperkuat keberagaman menuju persatuan. Keberagaman adalah realita dan itu harus diperkokoh dan dihargai untuk ditujukan kepada terciptanya persatuan nasional.



Ketua Pansus RUU Wasnus Daryatmo Mardijanto memberikan cenderamata kepada Tokoh Ulama Sumbar

Demikian ditegaskan Ketua Pansus RUU Wawasan Nusantara Daryatmo Mardijanto usai menggelar pertemuan dengan Pemerintah Daerah, Tokoh Agama, Kepala Lembaga Kekerabatan Adat Ala Minangkabau, Bundo Kandung dan Cerdik Pandai di Kantor Gubernur Sumatera Barat, Kota Padang, Senin (30/01).

Menurut Daryatmo, dipilihnya Sumbar dalam rangka menghimpun masukan bagi pembahasan RUU Wasnus ini karena daerah ini memiliki kekhasan, spesifikasi

dan peranan dalam memperkuat NKRI sejak merdeka hingga saat ini.

"Pansus akan mengunjungi beberapa daerah lagi guna memperkaya masukan dan wawasan pembahasan RUU ini," kata Daryatmo.

Lebih lanjut Politisi F-PDI Perjuangan itu menyebutkan, Sumbar memiliki kekhasan pada ajaran Islam yang bersumber pada Al Quran yaitu matrilineal sebagai bagian yang sangat kuat memposisikan tanah dan air dalam menegakkan ke Indonesiaan serta keutuhan

NKRI.

Selain itu, masih kata Daryatmo, kemerdekaan yang diproklamlirkan oleh Dwi Tunggal Bung Karno dan Bung Hatta adalah perpaduan ke tunggal ika yang berbasis pada kebhinekaan.

"Jadi yang kita harapkan adalah keberagaman yang mengarah pada Bhinneka Tunggal Ika, pada persatuan," tegasnya.

Tak dapat dipungkiri, lanjut Politisi asal dapil Jawa Tengah itu, ada ketegangan dan pemaksaan ke-ekaan itu sehingga menjadi

Calon Komisioner OJK Harus Mampu Hadapi Guncangan Ekonomi

Masa kerja komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera berakhir pada 23 Juli 2017. Calon komisioner OJK yang baru dituntut mampu menghadapi situasi krisis perekonomian dan guncangan finansial yang mungkin terjadi. Dibutuhkan komisioner yang kredibel dan berintegritas dalam menghadapi tren perekonomian ke depan.



tantangan Pansus untuk mewujudkan dalam rekonstruksi nasional melalui penyusunan RUU Wasnus ini.

Ditekankan lagi bahwa persatuan ini tidak statis tapi dinamis yang berangkat dari keberagaman untuk membangun kegotongroyongan, tenggang rasa, toleransi sekaligus memperkuat tunggal ika dan persatuan. Masyarakat Sumbar menyambut antusias RUU ini dengan berharap masukannya diakomodir sebab perangkat UU ini akan memperkuat keberagaman dan patriotisme. ■

imgj foto: masnur

Presiden Joko Widodo pada 10 Januari 2017 lalu telah mengeluarkan Kepres No.5/P Tahun 2017 tentang Pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) Pemilihan Calon Anggota Dewan Komisioner OJK Periode 2017-2022. Pansel harus bekerja transparan dan meminta masukan publik dalam proses seleksi calon komisioner OJK. Demikian disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan saat ditemui di DPR RI, Jakarta, Selasa (31/01).

UU No.21/2011 tentang OJK telah menetapkan kriteria umum calon komisioner OJK. Dalam Pasal 15 disebutkan, selain punya pengalaman dan keahlian, sang calon juga harus memiliki moralitas dan integritas yang baik. Peran OJK sangat strategis. Ia berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan jasa keuangan. Menurut Heri, tantangan ke depan sangat rumit dan ini membutuhkan perhatian serius, agar ekonomi nasional tak mengalami guncangan.

"Situasi dan perlambatan ekonomi global belum stabil dan diperkirakan terus berlanjut di tahun-tahun mendatang. Ketidakpastian itu semakin diperburuk dengan ekspektasi negatif kebijakan pemerintah baru AS yang memperketat kebijakan moneterinya, dampak Brexit, dan pertumbuhan negara ekonomi terbesar dunia, seperti China, yang diperkirakan akan terus menurun pada tahun-tahun berikut," tutur Anggota F-Gerindra itu.

Ditambahkan Heri, ancaman dan guncangan ekonomi juga datang dari Surat Utang Negara (SUN) yang terlalu gemuk. Ketergantungan pada Surat Berharga Negara (SBN) dan instrumen utang lainnya juga begitu tinggi, mencapai 98 persen dari total pembiayaan defisit. "OJK ke depan harus memiliki kontrol yang cermat atas dampak pembengkakan SUN yang dominan dimiliki



Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan

asing. Ini perlu dilakukan untuk mencegah pembalikan dana dalam jumlah besar secara tiba-tiba, yang sudah pasti akan mengguncang keuangan nasional," ungkap Heri.

Mantan Wakil Ketua Komisi VI RI ini, berharap, Pansel yang kini sedang bekerja harus merumuskan kriteria dan indikator khusus, lalu mengumumkannya. Calon harus punya track-record kecakapan bekerja dalam situasi tertentu. Tidak saja menguasai teori-teori, tapi juga kemampuan membaca tren sektor finansial yang terus berkembang.

"Tentunya kita semua berharap dapat memiliki komisioner OJK yang punya kemampuan dan pengalaman yang luas. OJK selaku regulator industri jasa keuangan dapat berperan penting dalam mengawal pertumbuhan ekonomi domestik dari berbagai gempuran ketidakpastian ekonomi global," tutup Heri. ■

mhvntj foto : sekakhr

BKSAP DPR RI Sesalkan Kebijakan Presiden AS Terkait Larangan Imigran

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Juliari Batubara, menyesalkan kebijakan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump terkait larangan masuknya tujuh warga negara muslim yakni Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Syria atau Yaman ke AS. Bahkan, kebijakan ini pun mendapat sorotan dari dunia.

“ Sikap BKSAP DPR RI tentunya menyesalkan adanya kebijakan tersebut yang di AS sendiri saja. Saat ini banyak mendapat kecaman,” tegas Juliari, Senin (30/01) malam.

Ketika ditanya terkait dampak kebijakan bagi Indonesia, Juliari menilai dampaknya memang belum terlalu kelihatan. Namun ia meminta Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri untuk mempelajari dampak kebijakan itu.

"Menurut saya untuk tahap sekarang, Menteri Luar Negeri Indonesia sebaiknya bertemu Dubes AS menanyakan lebih detail maksud dan tujuan daripada kebijakan tersebut," saran politisi F-PDI Perjuangan itu.

Juliari pun tak menampik adanya kemungkinan peningkatan potensi Anti AS di Indonesia, karena kebijakan AS terkait larangan masuknya imigran itu menuai pro dan kontra.

"Kami mengharapkan pihak kepolisian dapat selalu menjaga keamanan nasional kita," pesan politisi asal dapil Jawa Tengah itu.

Sementara itu, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Syaifullah Tamliha (F-PPP) mengatakan, akibat kebijakan itu, cenderung tidak berpengaruh pada Tanah Air.

"Indonesia dianggap sebagai pemeluk agama Islam moderat sehingga potensi gangguan kepada kita tentu cenderung tidak ada pengaruhnya atas kebijakan Trump itu," tambah politisi asal dapil Kalsel itu.

Dampak dari kebijakan Trump itu,

Kementerian Luar Negeri Indonesia melalui semua perwakilan di AS meminta WNI di Negeri Paman Sam untuk tetap tenang. Kemenlu meminta WNI tetap menghormati hukum setempat dan ikut berkontribusi menjaga ketertiban umum di lingkungan masing-masing.

Menlu Retno Marsudi pun menginstruksikan semua perwakilan di AS mengaktifkan layanan hotline selama 24 jam penuh.

Sebagaimana diketahui, Trump menandatangani perintah eksekutif yang isinya menghentikan sementara masuknya para pengungsi selama 120 hari, sedangkan untuk pengungsi Suriah batas waktu penghentian belum ditentukan batas waktunya.

Perintah eksekutif Trump itu juga melarang masuknya warga dari tujuh negara yang mayoritas penduduknya muslim, yakni Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Suriah dan Yaman, selama 90 hari ke depan.

Sejak perintah eksekutif Trump diberlakukan pekan lalu, para hakim federal dari empat negara bagian AS dengan bandara internasional - Massachusetts, New York, Virginia dan Washington - merilis 'izin tinggal sementara' untuk menanggukkan sebagian isi perintah eksekutif itu. Izin tinggal sementara ini mencegah otoritas masing-masing negara bagian untuk mendeportasi orang-orang yang ditahan di bandara karena larangan imigrasi Trump itu. ■

(istim) foto: tm parka



Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Juliari Batubara

Komisi V DPR RI Minta BMKG dan Basarnas Tingkatkan Pelatihan Bagi Masyarakat

Komisi V DPR RI memberikan apresiasi atas capaian prestasi, baik dari aspek keuangan, fisik, maupun juga prestasi-prestasi yang diraih oleh mitra kerjanya, yakni BMKG, Basarnas, BPLS, dan BPWS. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi V DPR RI Michael Wattimena usai mendengarkan paparan yang disampaikan beberapa mitra kerja tersebut dalam rapat dengar pendapat di Gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/01).



Suasana Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan BMKG dan Basarnas

Pada kesempatan itu, Anggota Komisi V DPR RI Sudjadi mengatakan, ketika negara banyak mengalami bencana seperti banjir, longsor, dan lain sebagainya, BMKG dan Basarnas tampil dengan prima. Sudjadi juga meminta kepada pihak Basarnas dan BMKG agar meningkatkan prosentase pelatihannya kepada masyarakat.

"Terkait pelatihan di Basarnas dan di BMKG perlu dinaikan 20 sampai 50 persen," ucapnya.

Senada dengan hal tersebut, Anggota Komisi V DPR RI Subarna menyampaikan, bahwa wilayah Jawa Barat adalah termasuk daerah yang rawan bencana. Banyak organisasi yang ada di Tasik dan Garut

siap untuk dilatih.

"Masyarakat harus ikut dilibatkan, mereka telah siap untuk dilatih. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat di wilayah Jawa Barat bisa melaksanakan berbagai kegiatan dan aktifitas untuk membantu mencegah berbagai kecelakaan yang mungkin terjadi," ujar Subarna.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDIP Rendy M Affandy Lamadjido mempertanyakan tentang penyerapan dana BMKG yang tidak sampai 99 persen lebih, hanya mencapai 95,96 persen. Menurutnya, bila merujuk pada manajemen yang baik, penyerapan dana dan fisik itu harus sama. Kalau fisiknya dapat menyerap hampir 100 persen, sementara penyerapan dana hanya berkisar

95,96 persen, maka ada selisih sekitar 4 persen.

"Kalau 4 persen dari 1 triliun lebih, maka ada 45 miliar. Dana yang tersisa cukup besar. Dengan 4 persen selisih itu, seharusnya bisa diberikan penjelasan apa yang menjadi masalah," jelasnya.

Rendy mengingatkan, agar ada kerjasama dengan pemerintah daerah terkait masalah pengukuran curah hujan.

"Kalau bisa disetiap desa, aparat-aparatnya mungkin bisa dilatih oleh BMKG untuk mengukur penakaran curah hujan. Hal itu dimaksudkan supaya bisa diantisipasi nanti kedepannya, kira-kira berapa besar curah hujan yang turun, dan dengan demikian kita bisa meminimalisasi tentang masalah banjir," tuturnya. ■



Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Sodik Mudjahid

“ Saat pertemuan, kami mendapati temuan bahwa Sabang belum membangun Master Plan. Untuk itu kami mempertanyakan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat, kenapa disini belum ada pembangunan Master Plan Tsunami dan juga belum ada anggaran untuk pembangunan Master Plan tersebut,” tanya Sodik saat pertemuan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Aceh dan BPBD Kota Sabang, perwakilan BPBD Pusat, Jum'at (27/01).

Terkait hal tersebut, politisi asal Gerindra ini juga menambahkan, temuan ini akan Komisi VIII perjuangkan anggarannya di APBN-P 2017, "Sambil menunggu APBN-P, BPBD Sabang diharapkan tetap melakukan kesiagaan apabila bencana Tsunami melanda,"ujarnya.

Dari sisi pencegahan bencana, Sodik menerangkan, pemerintah belum menetapkan Kota Sabang menjadi prioritas dalam pembangunan Master Plan Tsunami yang menjadi prioritas adalah Kota Banda Aceh dan Lhokseumawe. Mengingat pada bencana Tsunami tahun 2004 Banda Aceh dan Lhokseumawe dilalap air dengan ketinggian mencapai 30 meter sedangkan Sabang hanya 2 meter.

Sekedar informasi, Sabang berada di Pulau Weh yang notabene pulau paling ujung

Sabang Belum Bangun Master Plan Tsunami

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid saat memimpin Tim Kunspek Komisi VIII DPR RI mempertanyakan belum adanya pembangunan Master Plan Tsunami di Kota Sabang, Daerah Istimewa Aceh, sedangkan diketahui Sabang merupakan daerah potensi Tsunami.

Tugas dan fungsi DPR RI sesuai ketentuan peraturan Tata Tertib DPR RI yaitu memantau evaluasi pembangunan Master Plan Tsunami di Kota Sabang

barat Indonesia berada di titik nol kilometer. Pulau ini sangat berpotensi terkena bencana Tsunami karena dikelilingi oleh beberapa Samudera.

Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi VIII DPR RI kali ini dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi DPR RI sesuai ketentuan peraturan Tata Tertib DPR RI yaitu memantau evaluasi pembangunan Master Plan Tsunami di Kota Sabang, Daerah Istimewa Aceh.

Turut serta dalam rombongan Hamka Haq (F-PDIP), Diah Pitaloka (F-PDIP), Samsu Niang (F-PDIP), Endang Maria Astuti (F-PG), Firmandez (F-PG), Kuswiyanto (F-PAN), Bisri Romly (F-PKB), Ledia Hanifa Amaliah (F-PKS) dan Achmad Mustaqim (F-PPP). (chas), foto : chas/hr. ■

fmm/foto: Nialung/od

Keluarkan PP No.72/2016 Presiden Bisa Diinterpelasi

Presiden Joko Widodo diminta segera merevisi atau membatalkan PP No.72 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN. Bila tak direvisi atau dibatalkan, Presiden bisa diinterpelasi oleh DPR RI. PP ini menabrak sejumlah peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono dalam rilisnya yang diterima Parleментарia, Kamis

(26/01). Selain melanggar UU, PP tersebut juga membuka peluang korupsi. Ada banyak UU yang ditabrak oleh PP ini. Misalnya, Bambang menyebutkan, UU No.19/2003

Sukamta Kecam Penembakan Aktivis Pembela Rohingya

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mengecam penembakan seseorang bernama Ko Ni yang merupakan advokat yang selama ini dikenal rajin membela masyarakat minoritas Rohingya. Penembakan itu berlangsung di Bandara Internasional Yangon, Myanmar pada 29 Januari lalu. Demikian disampaikan dalam rilis yang diterima Parlemen pada Senin, (31/01).

“ Saya sangat prihatin sekaligus mengecam penembakan kepada saudara Ko Ni, ia baru saja datang ke Indonesia bersama rombongan Menteri Informasi Myanmar, Pe Myint dan sempat mengunjungi Ambon untuk mempelajari bagaimana menangani konflik komunal,” terang Sukamta.

Sebelum ada keterangan resmi dari Pemerintah Myanmar atas insiden ini, Sukamta menyatakan tidak ingin berspekulasi. “Yang saya dengar pelaku penembakan mantan tentara Myanmar yang telah disersi berpangkat kapten dan berstatus sebagai narapidana. Tentu hal ini cukup aneh mengingat statusnya sebagai narapidana.

Kita berharap pemerintah Myanmar dapat secara cepat mengungkap kasus penembakan ini,” kata Sukamta.

Politisi PKS ini juga berharap kasus penembakan aktivis hukum pembela minoritas Rohingya ini untuk menjadi perhatian dunia Internasional. Sudah sejak lama dirinya mendengar banyak tekanan dialami para aktivis kemanusiaan di negeri tersebut. “Dalam persoalan pelanggaran HAM dan tragedi kemanusiaan kita perlu memberikan perhatian, saya kira tidak ada niat kita mencampuri urusan dalam negeri Myanmar. Persoalan kemanusiaan bersifat universal, apalagi ini menyangkut dugaan genosida minoritas Rohingya,” sambungnya.



Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta

Atas kejadian ini, Sukamta berharap pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia di Myanmar juga lebih meningkatkan perhatian dan keamanan warga negara Indonesia di sana, khususnya para relawan kemanusiaan yang terlibat dalam upaya membantu meringankan derita etnis Rohingya di Myanmar. ■

(foto: jkr/ri)



Anggota Komisi VI DPR RI, Bambang Haryo Soekartono

tentang BUMN, UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara, dan UU No.1/2004 tentang Perbendaharaan Negara.

“Kalau pemerintah ngotot menerapkan PP 72, berarti Presiden dan menteri-menternya melanggar undang-undang. Anggota DPR bisa menggunakan hak interpelasi atau angket jika pemerintah bergeming,” tegas Anggota F-Gerindra tersebut.

Salah satu isu krusial dalam PP 72 adalah Pasal 2A Ayat (1) yang menyebutkan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang berasal dari kekayaan negara berupa saham milik negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas (PT) kepada BUMN atau PT lain, dilakukan oleh pemerintah pusat tanpa melalui mekanisme APBN. Ini telah melampaui mandat yang diatur Pasal 4 Ayat (6) UU BUMN. Pemerintah sudah terlalu jauh mengatur jenis PMN dan mekanisme perubahan komposisi PMN pada BUMN.

Seharusnya, kata Bambang, ini diatur terlebih dahulu pada level UU. Padahal, UU Keuangan Negara Pasal 24 Ayat (2) juga telah menegaskan bahwa pemberian pinjaman/hibah/penyertaan modal dan penerimaan pinjaman/hibah harus ditetapkan terlebih dahulu dalam APBN. Namun, pemerintah memisahkannya dari mekanisme APBN.

“PP ini ingin menafikan peran DPR dalam legislasi, anggaran, dan pengawasan terhadap BUMN sebagai aset negara. Saya khawatir akan terjadi penyelewengan dan korupsi terhadap aset dan keuangan negara yang sangat besar,” imbuhnya. KPK dan BPK pun diharapkan agar memantau dan menganalisa indikasi korupsi dan kerugian negara terkait PP 72 tersebut. ■

(mh/foto: m/ri)

Komisi VII DPR RI Evaluasi Kinerja Tahun 2016 Kementerian ESDM

Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dipimpin Ketua Komisi VII Gus Irawan Pasaribu dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengevaluasi kinerja Kementerian ESDM Tahun 2016.



Ketua Komisi VII DPR RI, Gus Irawan Pasaribu

“ Secara khusus rapat kali ini untuk melakukan evaluasi secara rinci terhadap pelaksanaan APBN dan kegiatan tahun 2016 pada Kementerian ESDM,” kata Gus Irawan saat memimpin rapat tersebut di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (30/01).

Menurut politisi Gerindra ini, selain mengevaluasi kinerja Kementerian ESDM, Komisi VII juga ingin mendapatkan gambaran awal tentang persiapan pelaksanaan kegiatan tahun 2017.

"Untuk ini Komisi VII DPR RI ingin memperoleh informasi secara detail dan komprehensif mengenai realisasi kegiatan dan anggaran Tahun 2016 serta capaian kinerja dan kegiatan prioritas di Tahun 2016, hambatan dan Kendala dalam pelaksanaan kegiatan di Tahun 2016. Evaluasi atas pelaksanaan kegiatan Tahun 2016. Langkah-langkah persiapan pelaksanaan kegiatan tahun 2017. Target dan prognosis penyerapan anggaran. Uraian tentang potensi kendala dan hambatan yang mungkin terjadi serta langkah-langkah antisipasinya. Dan isu yang menonjol dan berkembang terkait kebijakan di sektor ESDM,"

paparnya.

Selain itu, lanjut Gus Irawan, Komisi VII juga ingin mendapatkan penjelasan dan tanggapan pemerintah terkait Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tanggal 14 Desember 2016 terhadap UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Menurutnya, putusan MK tersebut telah membatalkan pasal penting terkait tentang keterlibatan swasta pada proyek listrik. "Putusan MK ini tentunya akan berdampak pada sektor ketenagalistrikan baik secara langsung maupun tidak langsung," ujar anggota DPR dari Sumatera Utara ini.

Oleh karenanya, Keputusan MK ini menjadi tantangan baru bagi pemerintah untuk mempercepat pembangunan listrik di seluruh wilayah negara RI.

Saat diberikan kesempatan, Menteri ESDM Ignasius Jonan menjelaskan kinerja Tahun 2016 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

"Berdasarkan pagu awal anggaran Kementerian ESDM sebesar Rp 8,56 triliun, menjadi Rp 7,74 triliun setelah diadakan revisi menjadi APBNP 2016," kata Jonan.

Ia menjelaskan, bahwa dari Rp 7,74 triliun itu berubah kembali menjadi Rp 6,09 triliun setelah adanya *save blocking*. Jika dilihat dari capaian realisasi menurut pagu APBNP capaiannya pada saat ini untuk Tahun 2016 mencapai 75,94% tapi tidak termasuk *save blocking*.

Setelah dikurangi *save blocking*, lanjutnya, maka pencapaian sebesar 96,55%. "Saya kira capaian ini dalam 2 atau 3 tahun ini tertinggi. Pencapaian penyerapan anggaran yang riil setelah *save blocking*. Karena ada *save blocking* sehingga anggaran yang bisa dipakai itu sebesar Rp 6,09 triliun dan penyerapannya 96,55%.

Dalam kesempatan tersebut, Jonan menjelaskan capaian kinerja bidang Migas dimana kapasitas kilang 1.169 ribu barel oil per hari itu mencapai sekitar 100,2%. *Lifting*

Putusan MK ini tentunya akan berdampak pada sektor ketenagalistrikan baik secara langsung maupun tidak langsung

minyak 829 itu melebihi target tahun 2016 APBN 825 menjadi 101,1%.

"Dapat kami jelaskan *lifting* minyak di 2017 target APBN 815. Jadi kalau 815 Kementerian ESDM dan SKK Migas memiliki target internal 825. Kita akan coba melebihi dari target *lifting* yang ditetapkan APBN. Kalau ditanya hari ini berapa, kira-kira hari ini di angka 823 atau 824. Bahkan kemarin itu *lifting* minyak mencapai 871 ribu. Jadi menurut saya cukup tinggi sekali," mantapnya.

Kemudian, ia menyampaikan *lifting* gas yang mencapai 1.184.000 barel *oil equipalence* per hari atau 103%. "ini juga di tahun 2017 target kami 1.250.000 barel *oil equipalence* per hari," pungkasnya.

Dari presentasi capaian kinerja Kementerian ESDM 2016 yang disampaikan Menteri ESDM tersebut mendapat apresiasi dari anggota Komisi VII DPR RI Dito Ganinduto.

"Kami lihat disini secara umum bagus. Hanya smelter saja yang masih dibawah 50%. Pada kesempatan ini kami mengucapkan apresiasi kepada pemerintah (Kementerian ESDM) yang tentunya telah bekerja keras sehingga bisa mencapai capaian tersebut," kata politisi Partai Golkar ini. ■



PIA DPR RI Selenggarakan Bakti Sosial di Kabupaten Pidie NAD

PIA DPR RI Selenggarakan Bakti Sosial di Kabupaten Pidie NAD

Persaudaraan Istri Anggota (PIA) DPR RI, masa bakti 2009-2014, Sabtu (28/01) menyelenggarakan aksi Bakti Sosial di Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi NAD, tepatnya di Kampung Kuta Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh.

Bakti Sosial PIA DPR RI dilakukan dalam rangka memberikan bantuan langsung kepada korban gempa Aceh di daerah Pidie Jaya yang terjadi pada bulan Desember 2016 lalu. Bantuan langsung tersebut dalam bentuk pembuatan MCK, pemberian bantuan mukena, Al-Qur'an, buku bacaan, perlengkapan sekolah dan pemberian healing pemulihan trauma kepada anak-anak korban gempa. Bakti Sosial dipimpin oleh Ketua PIA DPR RI, Deisti Setya Novanto.

Dalam sambutannya, Deisti Setya Novanto menyatakan bantuan yang diberikan oleh Persaudaraan Istri Anggota DPR RI kepada masyarakat di kampung Kuta Pangwa, sebagai bentuk peran sosial DPR RI dalam membantu korban bencana nasional yang terjadi di Indonesia.

"Bencana nasional yang terjadi di Kabupaten Pidie beberapa waktu lalu

menyisakan rusaknya beberapa fasilitas masyarakat dan trauma termasuk ke anak-anak. Kami isteri-isteri anggota DPR RI terpanggil untuk membantu meringankan beban masyarakat di Kampung Kuta Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie ini dengan membangun fasilitas MCK untuk masyarakat sekitar dan memberikan healing pemulihan pasca gempa kepada anak-anak. Persaudaraan Istri Anggota DPR RI yang terdiri dari 10 Fraksi dengan swasembada dan saling bahu membahu bekerjasama mewujudkan bantuan ini. Kami sangat bahagia bisa sedikit membantu masyarakat di Kampung Kuta Pangwa, besar harapan kami bantuan ini dapat menciptakan lingkungan yang bersih dan mengobati trauma akibat bencana," kata Deisti.

Lebih lanjut, Deisti juga menyatakan apresiasinya kepada seluruh anggota PIA

DPR RI yang terus menunjukkan komitmen membantu secara konkrit kepada masalah dan beban yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia

"Ini bentuk nyata perhatian dan kontribusi PIA DPR RI dalam membantu masyarakat Indonesia yang membutuhkan," tandasnya.

Acara Bakti Sosial yang juga dihadiri oleh Wakil Ketua PIA DPR RI, Grace Fadli Zon dan isteri Ketua Fraksi Hanura, Ibu Lina Nurdin Tampubolon, melakukan peletakan batu pertama pembuatan 4 fasilitas MCK yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat setempat.

Sementara itu, Ketua Pelaksana Bakti Sosial PIA DPR RI kali ini, Lina Nurdin Tampubolon, dalam sambutannya menjelaskan dasar pemutusan dilakukannya bakti sosial di Kampung Kuta Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten

Pidie. "PIA DPR RI yang selalu berkomitmen membantu masyarakat Indonesia yang membutuhkan telah menunjuk Isteri-isteri anggota DPR RI dari fraksi PDIP dan Hanura sebagai pelaksana bakti sosial kali ini dan kami melihat Kampung Kuta Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie sangat perlu mendapat bantuan mengingat tingkat kerusakan akibat gempa 7 Desember lalu cukup tinggi," jelas Lina.

Bakti Sosial ini diikuti pula isteri-isteri dari anggota DPR RI dari fraksi DPR RI yaitu PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, PKB, PKS, Nasdem, PPP dan Hanura melibatkan Pemerintah Daerah setempat yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie, Iskandar beserta jajarannya dan ratusan masyarakat di Kampung Kuta Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie.

Iskandar menyatakan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepedulian sosial yang ditunjukkan oleh PIA DPR RI dan semoga bantuan ini dapat benar-benar dipakai oleh masyarakat setempat untuk menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi trauma akibat gempa. Bantuan PIA DPR RI dalam bentuk lain juga sangat dihargai.

"Kami berharap bakti sosial ini tidak berakhir tahun ini saja tetapi akan berlangsung di tahun-tahun berikutnya, dan dapat juga diikuti oleh seluruh komponen. ■



Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam, Fadli Zon menerima Forum Ulama Indonesia

Pleno Baleg menandatangani Draf RUU Kekerasan Terhadap Perempuan. →



← Tim Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN), Badan Keahlian DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Banyuwangi.